

# FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI

**Dita Lina Kudrati<sup>1)</sup>, Ati Kusmiati<sup>2)</sup>**

1) Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Jember

2) Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jember

Jln. Kalimantan no. 37 Kampus Tegalboto - Jember 68121

email:www.ditz\_love@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*The scarcity of subsidized fertilizer in subdistrict of Wonosari, Bondowoso Country affects the farmer's exertion. Agriculture product decreases and to be hopeless. By this reason, farmers suffer operating loss. This will affect the available of national food. The scarcity of subsidized fertilizer in subdistrict of Wonosari, Bondowoso Country happened on the third of seasonal planting in 2007. This research is aimed to know: (1) Scarcity factors of subsidized fertilizer; (2) The effect of the scarcity of subsidized fertilizer on the farmer's motivation in maintaining farmer exertion; and (3) The effect of the scarcity of subsidized fertilizer on the productivity of farmer's exertion, especially on rice plant. This research is conducted conciously (Purposive Method). It is located in subdistrict Wonosari, Bondowoso Country. The research uses descriptive and comparative method. Sample was taken by using Cluster Sampling method consisting 35 respondents. On the other hand, the researcher also used Puposive Sampling method to determine the respondents criteria. Other respondents (beyond farmer) are the commision of subsidized fertilizer's superintendant, field instructor, legitimated kiosk of subsidized fertilizer, and distributor of subsidized fertilizer. Method the data analysis used descriptive analysis through indicators and stage test analysis of Wilcoxon. The result of the research shows that: (1) Scarcity factors of subsidized fertilizer that is the dependence of farmer on inorganic fertilizer, imbalance of fertilizer and menimizing role recommended by the government, extensification of area, and informal distributor of subsidized fertilizer; (2) The farmer's motivation is still high even the subsidized fertilizer is scarce; (3) The difference of productivity of farmer's exertion, especially on the rice farming.*

*Key Words: Scarcity of subsidized fertilizer, motivation, productivity exertion, and farmers.*

## PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subyek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional. Karena itu pengembangan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya memberdayakan ekonomi petani, merupakan inti dari upaya pembangunan pertanian/ pedesaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat pertanian menjadi mandiri dan mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Untuk mewujudkan visi pertanian tersebut, misi pembangunan pertanian adalah memberdayakan petani menuju suatu masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan (Sunu dan Wartoyo, 2009).

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah harus memperhatikan petani sebagai pelaku dalam menciptakan ketahanan pangan yang harus mendapatkan kemudahan dalam berusaha, salah satunya yaitu pemberian subsidi. Subsidi merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Subsidi diwujudkan sebagai hasil dari suatu kebijakan publik untuk memangkas harga yang diterima oleh produsen yang naik hingga di atas harga yang mampu dibayar oleh konsumen.

Dalam SK Menteri Pertanian Nomor 106/Kpts/SR.130/2/2004 mengenai pupuk bersubsidi disebutkan alasan pemberian subsidi adalah dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi komoditas pertanian. Untuk itu, perlu didukung dengan

penyediaan sarana produksi (pupuk) sampai di tingkat petani. Pemerintah berpandangan peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, sehingga pemerintah menetapkan pemberian subsidi pupuk.

Produksi pupuk sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah, karena produsen pupuk yang semuanya merupakan BUMN tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Selain produksi yang mengacu pada kebutuhan domestik, perkembangan produksi pupuk juga terkendala pasokan gas yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan perkembangan produksi cenderung stagnan (Laporan Market Intelligence, 2008).

Kelangkaan pupuk di beberapa daerah sentra produksi padi di Jawa sejak akhir April 2002 dapat berimplikasi serius terhadap ketahanan pangan nasional. Sebenarnya, pola kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini tidak jauh berbeda dari hal serupa pada tahun 1998/1999 sesaat setelah pencabutan subsidi pupuk. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi pada tahun 2008 masih kurang, karena total kebutuhan dan alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sebanding (Sinar Harapan, 2003).

### **Perumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana motivasi petani dalam berusaha dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi?
3. Bagaimana produktivitas usahatani petani dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi khususnya pada tanaman padi?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat

memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*). Menurut Suparmoko subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*) (Handoko dan Patriali, 2005).

Dalam Konstruksi Kebijakan Subsidi Pupuk Tahun 2006, menyatakan bahwa Salah satu faktor produksi penting dalam peningkatan kapasitas produksi pangan utama seperti padi adalah pupuk. Penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman akan mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional. Ada dua aspek untuk melihat pentingnya subsidi pupuk bagi petani yaitu: (1) kecenderungan peningkatan harga pupuk dunia dan (2) kecenderungan penurunan laba usahatani.

Abraham A. Maslow dalam Danim (2004) berpendapat bahwa ada kebutuhan internal yang sangat mempengaruhi kebutuhan manusia dalam bekerja. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan itu tersusun sebagai hierarki yang terdiri atas lima tingkatan kebutuhan. Teori ini lebih dikenal dengan sebutan teori hierarki kebutuhan menurut Maslow (*Maslow's Hierarchy of Needs*). Kebutuhan manusia, menurut Maslow terdiri dari lima tingkatan, di mana sifatnya berjenjang. Jika kebutuhan pertama telah terpenuhi, orang akan berusaha mencapai pemenuhan kebutuhan yang kedua, dan demikian seterusnya.

Pemberian subsidi kepada petani merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah dengan cakupan dan besaran yang berubah dari waktu ke waktu. Fakta empiris memang telah membuktikan bahwa kebijakan subsidi dan

dukungan harga bagi petani belum terlaksana dengan lancar dan efektif. Barangkali, akar penyebabnya ialah karena masing-masing instrumen kebijakan dirancang dan dilaksanakan terpisah-pisah, tidak koheren atau bahkan tidak konsisten satu sama lainnya. Kesesuaian rancang-bangun dan pelaksanaan setiap jenis subsidi dan dukungan harga serta keterpaduan relasi antar instrumen kebijakan adalah syarat mutlak agar kebijakan tersebut efektif baik dari segi output maupun dari segi biaya.

Teori Maslow yang termasuk dalam teori kepuasan yang mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan diartikan sebagai kekuatan (energi) yang menghasilkan dorongan bagi individu untuk melakukan kegiatan, agar dapat memenuhi keinginannya. Kebutuhan sifatnya bertingkat yang secara berurutan dan berbeda kekuatan dalam memotivasi suatu kegiatan (Hasibuan, 2003).

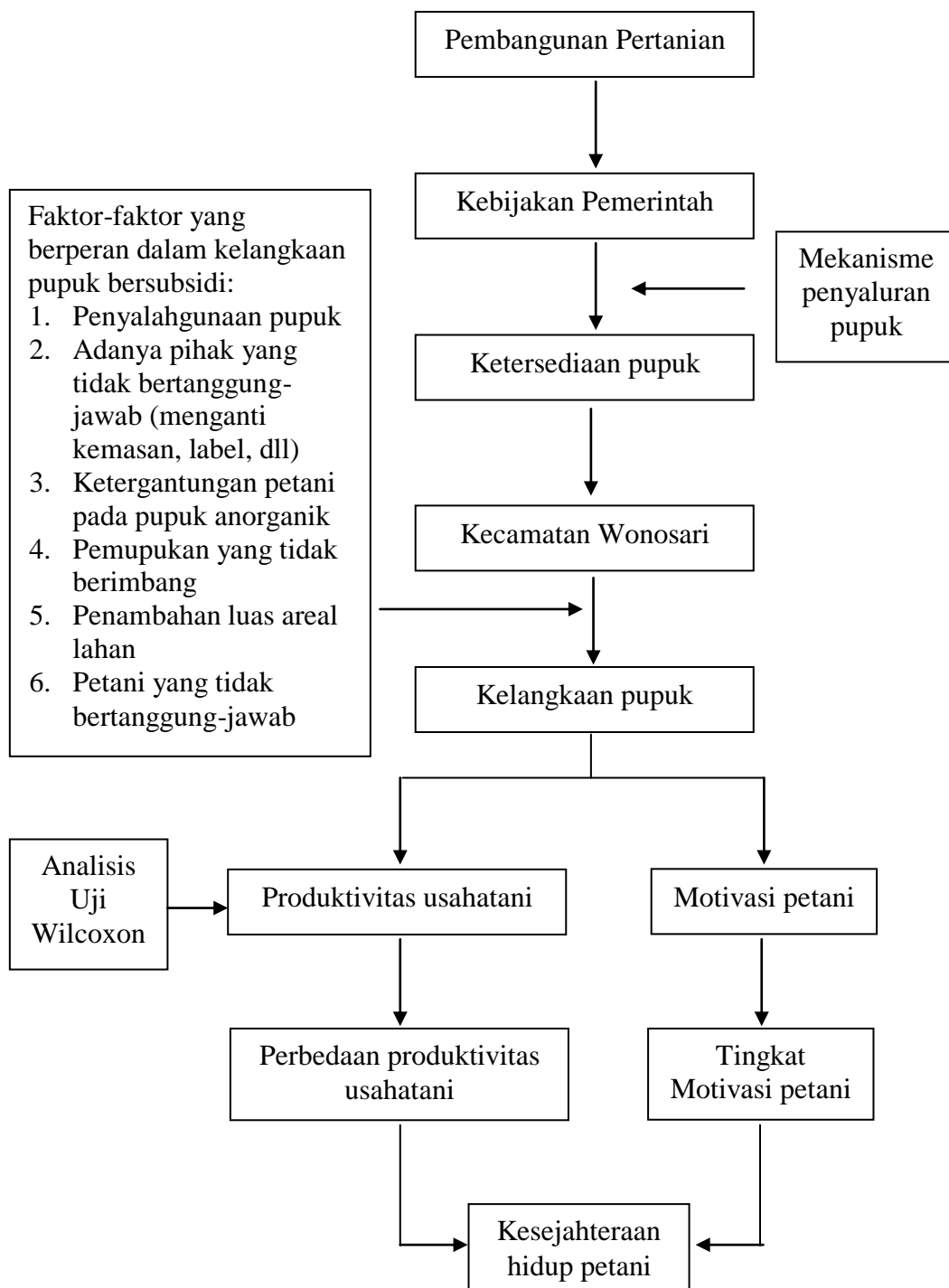
Menurut Mulyadi (2003) menjelaskan bahwa satu hal yang tidak kalah penting adalah motivasi, kebiasaan, pengalaman, dan modal petani. Meskipun lahan dan air cukup tersedia, apabila tidak ada keinginan petani untuk berusaha serta tidak di dukung oleh modal yang cukup, maka lahan akan tetap bera di musim kemarau. Motivasi petani yang cukup besar dalam berusaha terutama untuk memanfaatkan sumber daya lahan dan air secara optimal dapat menjadi kunci keberhasilan pertanian. Hanya saja, tidak setiap petani mempunyai motivasi seperti itu.

Produktivitas merupakan keluaran yang dihasilkan diperoleh dari keseluruhan

masukan yang ada dalam suatu organisasi. Masukan tersebut lazim dinamakan sebagai faktor produksi. Keluaran yang dihasilkan dicapai dari masukan yang melakukan poses kegiatan yang bentuknya dapat berupa produk nyata atau jasa. Masukan atau faktor produksi dapat berupa tenaga kerja, kapital, bahan, teknologi, dan energi. Salah satu masukan seperti tenaga kerja, dapat menghasilkan keluaran yang dikenal dengan produktivitas parsial (Sedarmayanti, 2001).

Secara umum produktivitas di artikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masuknya yang sebenarnya. Misalnya saja produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masuk atau output : input. Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk dan nilai.

Tingkat produktivitas yang dicapai merupakan indikator terhadap efisiensi dan terhadap kemajuan ekonomi, baik untuk ukuran suatu bangsa maupun untuk ukuran suatu industri atau pendidikan. Masalah peningkatan produktivitas merupakan tujuan dan perhatian utama dari setiap organisasi, baik organisasi sosial maupun lembaga pendidikan. Oleh karena itu, salah satu usaha yang konkrit dan terarah serta terpadu yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan agar mampu mengemban tugas atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya (Sedarmayanti, 2001).



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

## Hipotesis

1. Tingkat motivasi petani dalam penggunaan pupuk bersubsidi dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi adalah tinggi.
2. Terdapat perbedaan produktivitas petani dalam berusahatani sebelum dan sesudah adanya kelangkaan pupuk bersubsidi.

## METODE PENELITIAN

Daerah penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Penentuan daerah tersebut ini dilakukan berdasarkan metode disengaja (*Purposive Method*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif dan komparatif dengan menggunakan metode pengambilan contoh *Cluter Sampling* dan *Purposive Sampling*.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 35 petani berdasarkan pada penetapan sampel minimal. Selain petani, sampel juga diambil dari KP3, PPL, Kios Pupuk, dan Distributor. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Mengenai permasalahan faktor-faktor yang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran dan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut. Selain kepada petani, peneliti juga mewawancarai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Kios Resmi Pupuk Bersubsidi, dan Distributor pupuk bersubsidi untuk mengungkap faktor-faktor yang berperan di dalamnya. Adapun faktor-faktor yang akan diuji yaitu Penyalahgunaan pupuk, Adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab (menganti kemasan, label, dll). Ketergantungan petani pada pupuk anorganik, Pemupukan yang tidak berimbang, Penambahan luas areal lahan, dan Petani yang tidak bertanggung jawab.

Pengujian untuk hipotesis pertama mengenai motivasi petani akibat adanya kelangkaan pupuk bersubsidi yaitu dengan menggunakan indikator Pemenuhan kebutuhan, Kepuasan penggunaan pupuk, Kenyamanan penggunaan pupuk,

Ketersediaan modal, dan Lingkungan sosial. Untuk kriteria pengambilan keputusan pada tingkat motivasi yaitu:

1. Skor 130 - 260 : motivasi rendah
2. Skor 265 - 390 : motivasi tinggi

Kemudian dilanjutkan perhitungan tingkat motivasi tinggi dan rendah dengan formulasi sebagai berikut (Umar, 1997):

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n e_i}{\text{totalskormaks.}}$$

Keterangan:

E = tingkat motivasi

$e_i$  = motivasi oleh sampel ke-i

n = jumlah sampel

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika  $E \geq 50\%$  = motivasi tinggi
2. Jika  $E < 50\%$  = motivasi rendah

Kemudian untuk pengujian hipotesis kedua mengenai produktivitas usahatani akibat adanya kelangkaan pupuk bersubsidi yaitu menggunakan uji Wilcoxon. Untuk pasangan yang lebih banyak daripada 25 ( $n > 25$ ), tabel nilai T tidak dapat dipergunakan. Dalam distribusi sampling nilai T diketahui bahwa:

$$E(T) = \frac{n(n+1)}{4}$$
$$\sigma_T = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

Keterangan:

E : rata-rata variabel

$\sigma_T$  : standar deviasi

n : jumlah sampel

Untuk landasan pengujian dipergunakan nilai Z:

$$Z = \frac{T - E(T)}{\sigma_T}$$

Kriteria keputusan pengujianya adalah:

1. Probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat perbedaan produktivitas usahatani akibat adanya kelangkaan pupuk bersubsidi.
2. Probabilitas  $\leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat perbedaan produktivitas usahatani akibat adanya kelangkaan pupuk bersubsidi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

#### • Penyalahgunaan pupuk bersubsidi

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:

Pada Tabel 1, jumlah responden pada Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) adalah 4 responden. Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) menyatakan bahwa di Kabupaten Bondowoso tidak pernah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Pada saat petugas dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) turun ke lapang untuk mengawasi, mereka menyatakan

bahwa tidak pernah terdapat kejadian yang mencurigakan. Pengawasan yang dilakukan Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) kurang efektif karena mereka turun ke lapang hanya tiap 3 bulan dan wilayah yang diawasi cukup banyak, yaitu 23 Kecamatan. Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) menyatakan pada saat ke lapang, mereka mendekati diri pada Distributor dan Kios Pupuk untuk mengetahui kondisi yang ada. Sehingga Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) dapat menyimpulkan kondisi yang terjadi di lapang, apakah terjadi kecurangan atau tidak dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Tabel 1. Kriteria Faktor Penyalahgunaan Pupuk oleh KP3, PPL, Kios Pupuk, Distributor dan Petani

No	Kriteria Faktor Penyalahgunaan Pupuk	Jawaban (Jumlah Responden)		
		0	1	2
<b>KP3:</b>				
1	Tingkat penyalahgunaan pupuk	4	-	-
<b>PPL:</b>				
1	Tingkat penyalahgunaan pupuk	5	-	-
2	Tingkat pengetahuan tentang perbedaan pupuk yang disalahgunakan	4	1	-
<b>Kios Pupuk:</b>				
1	Tingkat penyalahgunaan pupuk	4	3	-
2	Tingkat pengetahuan tentang perbedaan pupuk yang disalahgunakan	7	-	-
<b>Distributor:</b>				
1	Tingkat penyalahgunaan pupuk	2	-	-
2	Tingkat pengetahuan tentang perbedaan pupuk yang disalahgunakan	-	1	1
<b>Petani:</b>				
1	Tingkat pengetahuan dalam penyalahgunaan pupuk	8	19	8
2	Tingkat pengetahuan tentang perbedaan pupuk yang disalahgunakan	5	23	7
3	Tingkat kesulitan mendapatkan pupuk	8	2	25
4	Pendapat pihak yang mampu menyalahgunakan pupuk	Kios Pupuk (15), Distributor (20), Perusahaan (16), Pihak yang tidak Bertanggung-jawab (4)		
5	Kebijakan pemerintah	a. Memperketat Pengawasan (17 Petani) b. Pupuk diberikan langsung pada petani (7 Petani) c. Memperbaiki distribusi (7 Petani) d. Kebijakan pupuk diperbaiki (3 Petani)		

Keterangan:

0 : tidak tahu/tidak pernah

1 : kurang tahu/kadang-kadang

2 : tahu/pernah

Pernyataan dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) dapat disimpulkan bahwa faktor penyalahgunaan pupuk bersubsidi tidak berperan dalam kelangkaan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Menurut seluruh Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang menjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso menyatakan bahwa di daerah tugas mereka tidak pernah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Tingkat pengetahuan Petugas Penyuluh Lapang (PPL) tentang perbedaan pupuk yang disalahgunakan, yaitu sebanyak 4 responden Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana cara membedakan pupuk yang disalahgunakan dan tidak disalahgunakan, karena menurut mereka di tempat mereka tidak pernah terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Sedangkan seorang Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan kurang mengetahui tentang perbedaan pupuk yang disalahgunakan. Pernyataan dari Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang menjadi responden dapat disimpulkan bahwa faktor penyalahgunaan pupuk bersubsidi tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Menurut 4 Kios resmi pupuk bersubsidi yang menjadi responden menyatakan bahwa Kios tersebut tidak mengetahui tentang adanya penyalahgunaan pupuk bersubsidi di daerah mereka. Sedangkan 3 Kios resmi pupuk bersubsidi yang lain menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui tentang terjadinya penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Seluruh Kios resmi pupuk bersubsidi yang menjadi responden mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui antara pupuk yang disalahgunakan dan yang tidak disalahgunakan. Pernyataan dari Kios resmi pupuk bersubsidi tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyalahgunaan pupuk bersubsidi tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Distributor adalah pihak yang menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Kios

resmi pupuk bersubsidi untuk disalurkan kepada petani. Bagi 2 Distributor resmi pupuk bersubsidi yang menjadi responden, menyatakan bahwa tingkat penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah distribusi mereka tidak pernah terjadi. Jika terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi, harus diserahkan kepada pihak kepolisian. Salah satu Distributor resmi pupuk bersubsidi menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui bagaimana cara membedakan pupuk bersubsidi yang disalahgunakan dan yang tidak disalahgunakan. Sedangkan salah satu dari Distributor resmi pupuk bersubsidi menyatakan bahwa mereka dapat membedakan pupuk bersubsidi yang disalahgunakan dan yang tidak disalahgunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penyalahgunaan pupuk bersubsidi tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Petani adalah penerima terakhir dari pupuk bersubsidi. Sebanyak 8 petani responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui penyalahgunaan pupuk bersubsidi terjadi di tempat mereka, dan 19 petani responden menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui adanya penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Namun 8 petani responden lainnya mengetahui di tempat mereka terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi, tetapi tidak terdapat bukti yang nyata yang bisa ditunjukkan oleh petani. Tingkat pengetahuan petani tentang perbedaan pupuk bersubsidi yang disalahgunakan sebanyak 5 dan 23 petani responden menyatakan tidak tahu dan kurang tahu cara membedakannya, dan 7 petani responden mampu membedakan pupuk yang disalahgunakan yaitu dengan memperhatikan dan membandingkan pupuk bersubsidi, sehingga terlihat jelas perbedaan yang terjadi. Sebanyak 8 dan 2 petani responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kesulitan dan kadang-kadang mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Namun 25 petani responden menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi, baik itu kesulitan karena keterlambatan pupuk bersubsidi maupun kesulitan dari petani itu sendiri. Kesulitan dari petani sendiri

dikarenakan petani belum membayar pajak lahan sawah yang diusahakan mereka.

Menurut pendapat petani bahwa pihak yang mampu menyalahgunakan pupuk bersubsidi adalah Perusahaan, Distributor, Kios pupuk, dan Pihak yang tidak bertanggung-jawab yang terlibat dalam pendistribusian pupuk. Kebijakan pemerintah yang perlu diterapkan menurut petani adalah memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, memperbaiki sistem distribusi pupuk dan kebijakan pupuk bersubsidi perlu diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi yang nantinya tidak akan menimbulkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Satu hal yang disarankan oleh petani adalah bahwa pupuk bersubsidi langsung diberikan kepada petani. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Pernyataan dari yang diberikan petani, dapat disimpulkan bahwa

Tabel 2. Kriteria Faktor Adanya Pihak yang Tidak Bertanggung-jawab (Mengganti Kemasan, Label, dll) oleh KP3, PPL, Kios Pupuk, Distributor dan Petani

No	Kriteria Faktor Adanya Pihak yang Tidak Bertanggung-Jawab (Mengganti Kemasan, Label, dll)	Jawaban (Jumlah Responden)		
		0	1	2
<b>KP3:</b>				
1	Pengetahuan terhadap perubahan kemasan/bentuk dll oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab	4	-	-
<b>PPL:</b>				
1	Pengetahuan terhadap perubahan kemasan/bentuk dll oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab	4	1	-
<b>Kios Pupuk:</b>				
1	Pengetahuan terhadap perubahan kemasan/bentuk dll oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab	3	4	-
<b>Distributor:</b>				
1	Pengetahuan terhadap perubahan kemasan/bentuk dll oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab	2	-	-
<b>Petani:</b>				
1	Pengetahuan terhadap perubahan kemasan/bentuk dll oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab	4	19	12
2	Pernah mengalami no.1	33	2	-
3	Pendapat siapa yang melakukan perubahan	Kios Pupuk (22), Distributor (24), Pihak yang berada dalam distribusi (3)		

Keterangan:

0 : tidak tahu/tidak pernah

1 : kurang tahu/kadang-kadang

2 : tahu/pernah

faktor penyalahgunaan pupuk bersubsidi tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan seluruh kesimpulan yang diperoleh dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3), Petugas Penyuluh Lapang (PPL), Kios resmi pupuk bersubsidi, Distributor resmi pupuk bersubsidi, dan petani, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyalahgunaan pupuk bersubsidi tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

• **Adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab (mengganti kemasan, label, dll)**

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:



Tabel 2 merupakan tabel mengenai faktor adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab. Seluruh Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang perubahan kemasan/bentuk dll. Hal ini dikarenakan Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) tidak pernah menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Jika memang pernah terjadi kejanggalan, Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) pasti mengetahui karena banyak informasi yang masuk pada Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3). Pernyataan dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) dapat disimpulkan bahwa adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab (mengganti kemasan, label, dll) tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Pengetahuan tentang adanya Pihak yang tidak bertanggung-jawab (mengganti kemasan, label, dll) tidak diketahui dan kurang diketahui oleh pihak Petugas Penyuluh Lapang (PPL). Dari 4 responden Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan tidak mengetahui adanya pihak yang merubah kemasan/bentuk, label dll dan seorang Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan tidak mengetahui adanya pihak yang merubah kemasan/bentuk, label dll. Pernyataan dari Petugas Penyuluh Lapang (PPL) tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab (mengganti kemasan, label, dll) tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Menurut 4 Kios resmi pupuk bersubsidi yang menjadi responden menyatakan bahwa sebagian besar Kios kurang mengetahui adanya perubahan terhadap kemasan/bentuk, dll yang terjadi pada pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. Sedangkan 3 Kios resmi pupuk bersubsidi yang lain menyatakan tidak mengetahui perubahan yang terjadi pada kemasan/bentuk dll yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. Pernyataan dari Kios resmi pupuk bersubsidi

ini dapat disimpulkan bahwa adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab (mengganti kemasan, label, dll) tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Seluruh Distributor resmi pupuk bersubsidi menyatakan bahwa Distributor tidak pernah mengetahui adanya pihak yang melakukan perubahan terhadap kemasan/bentuk, dll pada pupuk bersubsidi. Namun Distributor resmi pupuk bersubsidi ini dapat mengetahui dan mengenali jika terjadi perubahan yang nyata pada produk pupuk bersubsidi. Hal ini dikarenakan bahwa Distributor sudah mempelajari dan mengenal produk pupuk bersubsidi karena hampir setiap hari mereka berhubungan dengan pupuk bersubsidi tersebut. Pernyataan dari Distributor resmi pupuk bersubsidi tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab (mengganti kemasan, label, dll) tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Pengetahuan terhadap perubahan kemasan, label, dll pada pupuk bersubsidi oleh petani yaitu bahwa 4 petani responden dan 19 petani responden menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui dan tidak mengetahui terlalu banyak apabila produk pupuk bersubsidi berubah, baik dari kemasan, label, ataupun yang lain. Sebanyak 33 petani responden menyatakan tidak pernah mengalami hal tersebut, sedangkan 12 petani responden menyatakan dapat mengetahui apabila produk pupuk bersubsidi berubah, karena mereka juga memperhatikan produk pupuk bersubsidi tersebut, baik kemasan/bentuk dll, dan bagi 2 petani responden mengaku kurang mengetahui apakah mereka pernah mengalami hal tersebut atau tidak. Petani berpendapat bahwa yang mampu melakukan perubahan pada produk pupuk bersubsidi selain perusahaan adalah Distributor dan Kios resmi pupuk bersubsidi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi, misalnya pihak-pihak yang bekerja pada Distributor. Pernyataan dari Petani dapat disimpulkan bahwa adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab (mengganti kemasan, label, dll) tidak berperan dalam kelangkaan pupuk

bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan seluruh kesimpulan yang diperoleh dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Kios resmi pupuk bersubsidi, Distributor resmi pupuk bersubsidi, dan petani, peneliti menyimpulkan bahwa faktor adanya pihak yang tidak bertanggung-jawab (mengganti kemasan, label, dll) tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

• **Ketergantungan petani pada pupuk anorganik**

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:

Pada Tabel 3, menurut 4 responden Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk

Bersubsidi (KP3), bahwa petani sangat tergantung pada pupuk bersubsidi, yaitu pupuk anorganik. Ketergantungan ini disebabkan karena petani telah terbiasa menggunakan pupuk anorganik bersubsidi, dan apabila petani tidak menggunakan pupuk anorganik bersubsidi, petani merasa ada sesuatu yang kurang dalam berusahatani. Anggapan Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) ini didasarkan pada survey pada saat turun ke lapang. Pernyataan dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3), dapat disimpulkan bahwa ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Tabel 3. Kriteria Faktor Ketergantungan Petani Terhadap Pupuk Anorganik oleh KP3, PPL, Kios Pupuk, Distributor dan Petani

No	Kriteria Faktor Ketergantungan Petani Terhadap Pupuk Anorganik	Jawaban (Jumlah Responden)		
		0	1	2
<b>KP3:</b>				
1	Ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi	-	-	4
<b>PPL:</b>				
1	Ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi	1	2	2
2	Penggunaan pupuk anorganik oleh petani	1	-	4
<b>Kios Pupuk:</b>				
1	Ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi	-	-	7
<b>Distributor:</b>				
1	Ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi	-	-	2
<b>Petani:</b>				
1	Penggunaan pupuk anorganik bersubsidi	-	-	35
2	Pengalaman untuk beralih pada pupuk organik	20	15	-
3	Pendapat bahwa semua petani menggunakan pupuk anorganik	-	-	35

Keterangan:

0 : tidak /tidak pernah

1 : kurang tahu/kadang-kadang

2 : iya/pernah

Dijelaskan oleh salah satu Petugas Penyuluh Lapang (PPL) bahwa petani di tempat tugas mereka tidak lagi tergantung pada pupuk anorganik, tetapi mereka telah mencampur dengan pupuk organik. Selain itu, 2 responden Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui apakah petani mereka masih tergantung pada pupuk anorganik atau tidak, dan 2 responden Petugas Penyuluh Lapang (PPL) lainnya menyatakan bahwa petani mereka masih sangat tergantung pada pupuk anorganik. Petugas Penyuluh Lapang (PPL) juga mengaku bahwa sebagian besar petani mereka masih menggunakan pupuk anorganik dan beberapa petani telah menggunakan pupuk organik dalam berusahatani walaupun komposisinya tidak sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang. Pernyataan dari Petugas Penyuluh Lapang (PPL) ini dapat disimpulkan bahwa ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Menurut seluruh Kios resmi pupuk bersubsidi yang menjadi responden menyatakan bahwa petani sangat tergantung pada pupuk anorganik bersubsidi karena petani sudah terbiasa menggunakan pupuk anorganik tersebut. Petani juga lebih tergantung pada pengalaman yang dimiliki, karena menurut mereka pengalaman sangat penting dalam berusahatani. Pernyataan dari Kios resmi pupuk bersubsidi ini dapat disimpulkan bahwa ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Seluruh Distributor resmi pupuk bersubsidi menyatakan bahwa petani sangat tergantung pada pupuk anorganik. Hal ini dikarenakan petani sudah terbiasa dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki. Anggapan Distributor ini berdasarkan pada kebutuhan pupuk anorganik bersubsidi oleh petani. Pernyataan dari Distributor resmi

pupuk bersubsidi ini dapat disimpulkan bahwa ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Seluruh petani responden menyatakan bahwa mereka masih menggunakan pupuk anorganik bersubsidi, begitu juga dengan semua petani yang ada di daerah mereka. Petani responden beralasan bahwa mereka sudah terbiasa menggunakan pupuk anorganik sehingga petani merasa takut gagal apabila hanya menggunakan pupuk organik. Namun 15 petani responden menyatakan bahwa mereka telah menggunakan pupuk organik, walaupun jumlahnya tidak sesuai dengan anjuran pupuk berimbang, artinya 15 petani responden telah mencampur penggunaan pupuk anorganik dengan organik dalam berusahatani. Sebanyak 20 petani responden menyatakan mereka hanya menggunakan pupuk anorganik. Penggunaan pupuk anorganik oleh petani yang tidak ingin mencampur dengan pupuk organik menyebabkan kondisi pupuk anorganik menjadi berkurang dan sulit untuk didapatkan lagi. Pernyataan petani dapat disimpulkan bahwa ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan seluruh kesimpulan yang diperoleh dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3), Petugas Penyuluh Lapang (PPL), Kios resmi pupuk bersubsidi, Distributor resmi pupuk bersubsidi, dan petani, peneliti menyimpulkan bahwa faktor ketergantungan petani pada pupuk anorganik bersubsidi berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

- **Pemupukan yang tidak berimbang**

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4. Kriteria Faktor Pemupukan yang Tidak Berimbang oleh KP3, PPL, Kios Pupuk, Distributor dan Petani**

No	Kriteria Faktor Pemupukan yang Tidak Berimbang	Jawaban (Jumlah Responden)		
		0	1	2
<b>KP3:</b>				
1	Penggunaan pupuk anorganik	-	-	4
2	Petani menggunakan anjuran pupuk berimbang	2	2	-
<b>PPL:</b>				
1	Penggunaan pupuk anorganik	1	-	4
2	Petani menggunakan anjuran pupuk berimbang	-	1	4
<b>Kios Pupuk:</b>				
1	Penggunaan pupuk anorganik	-	-	7
2	Petani menggunakan anjuran pupuk berimbang	5	1	1
<b>Distributor:</b>				
1	Penggunaan pupuk anorganik	-	-	2
2	Petani menggunakan anjuran pupuk berimbang	-	1	1
<b>Petani:</b>				
1	Penggunaan pupuk anorganik	-	-	35
2	Pendapat petani tentang anjuran pupuk berimbang oleh pemerintah	7	17	11
3	Kebiasaan petani menggunakan pupuk anorganik	-	-	35

Keterangan:

**0** : tidak/tidak tahu      **1** : kurang tahu/kadang-kadang      **2** : iya/menguntungkan

Berdasarkan Tabel 4, seluruh Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) menyatakan bahwa petani masih menggunakan pupuk anorganik, tetapi belum tentu penggunaan pupuk anorganik tersebut sesuai dengan anjuran pupuk berimbang. Petani dalam menggunakan pupuk anorganik biasanya melebihi dari yang dianjurkan oleh Pemerintah. Menurut 2 responden dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) menyatakan bahwa petani masih belum menggunakan pemupukan berimbang, dan 2 responden Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) lainnya menyatakan kurang mengetahui apakah petani telah menggunakan pemupukan berimbang atau tidak. Pernyataan dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) dapat disimpulkan bahwa pemupukan yang tidak berimbang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Sebagian besar atau 4 responden Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan bahwa petani di tempat tugas mereka masih menggunakan pupuk anorganik. Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan bahwa untuk merubah sikap petani harus terdapat contoh yang mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Petani adalah sosok yang tidak mudah terpengaruh karena petani sangat tergantung pada pengalaman yang dimiliki. Namun, 4 responden Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan bahwa petani telah menggunakan pemupukan berimbang, walaupun komposisinya tidak sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Petani masih menggunakan pupuk anorganik lebih banyak dibandingkan dengan pupuk organik. Pernyataan dari Petugas Penyuluh Lapang (PPL) dapat disimpulkan bahwa pemupukan yang tidak berimbang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Menurut seluruh Kios resmi pupuk bersubsidi menyatakan bahwa semua petani masih menggunakan pupuk anorganik. Pembelian pupuk oleh petani di Kios pupuk menyimpulkan bahwa sebagian besar petani masih belum menggunakan pupuk berimbang. Namun salah satu Kios resmi pupuk bersubsidi mengungkapkan bahwa terdapat beberapa petani yang telah menggunakan pupuk berimbang (mencampur pupuk anorganik dengan pupuk organik), walaupun komposisinya tidak sesuai dengan anjuran Pemerintah. Pernyataan dari Kios resmi pupuk bersubsidi dapat disimpulkan bahwa pemupukan yang tidak berimbang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Seluruh Distributor resmi pupuk bersubsidi menyatakan bahwa sebagian besar petani masih menggunakan pupuk anorganik dalam berusahatani. Namun salah satu Distributor menyatakan bahwa petani telah menggunakan pemupukan berimbang, walaupun tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Komposisi yang digunakan petani masih lebih banyak pupuk anorganik daripada pupuk organik. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara Distributor dengan beberapa petani yang ditemuinya, karena terkadang Distributor melakukan survey ke lapang. Pernyataan dari Distributor resmi pupuk bersubsidi dapat disimpulkan bahwa pemupukan yang tidak berimbang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Seluruh petani responden mengaku bahwa mereka masih menggunakan pupuk anorganik. Karena selalu menggunakan pupuk anorganik, sehingga membuat petani terbiasa menggunakan pupuk anorganik tersebut, meskipun terdapat beberapa petani yang telah menggunakan pupuk berimbang (mencampur), walaupun komposisinya masih belum seimbang. Tetapi mereka tidak dapat lepas dari pupuk anorganik. Sebanyak 7 petani responden dan 17 petani responden menyatakan bahwa pupuk berimbang yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak tepat dan kurang sesuai. Hal ini dikarenakan bahwa sifat tanah sawah yang berada di daerah mereka telah rusak, sehingga diperlukan suatu teknologi untuk

menetralsir sifat tanah tersebut. Petani menganggap untuk menetralsir sifat tanah yang telah rusak tersebut, petani harus menggunakan pupuk anorganik berlebih dan mereka menganggap pemupukan berimbang tersebut kurang baik. Namun 11 petani responden lainnya menganggap bahwa pemupukan berimbang yang telah ditetapkan pemerintah adalah menguntungkan/baik. Walaupun 11 petani respoden ini menyatakan bahwa pemupukan berimbang menguntungkan, tetapi ada sebagian dari mereka masih belum mampu menggunakan pemupukan berimbang dikarenakan mereka telah terbiasa menggunakan komposisi sesuai dengan aturan yang telah dibuat sendiri dan mereka lebih tergantung pada pengamalan yang telah dimiliki. Pernyataan dari petani dapat disimpulkan bahwa pemupukan yang tidak berimbang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan seluruh kesimpulan yang diperoleh dari Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3), Petugas Penyuluh Lapang (PPL), Kios resmi pupuk bersubsidi, Distributor resmi pupuk bersubsidi, dan petani, peneliti menyimpulkan bahwa faktor pemupukan yang tidak berimbang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

- **Penambahan luas areal lahan**

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 5, seluruh responden Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) menyatakan bahwa Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) tidak mengetahui apakah petani memperluas lahan usahatannya atau tidak. Hal ini dikarenakan Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) hanya melakukan survey pada Distributor dan Kios Pupuk resmi pupuk bersubsidi, dan Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) kurang melakukan pendekatan pada petani.

Sebagian besar Petugas Penyuluh Lapang (PPL), yaitu 4 Petugas Penyuluh Lapang (PPL).

Tabel 5. Kriteria Faktor Penambahan Luas Areal Lahan oleh KP3, PPL, Kios Pupuk, Distributor dan Petani

No	Kriteria Faktor Penambahan Luas Areal Lahan	Jawaban (Jumlah Responden)		
		0	1	2
<b>KP3:</b>				
1	Penambahan luas lahan baru petani	4	-	-
<b>PPL:</b>				
1	Penambahan luas lahan baru petani	4	-	1
<b>Kios Pupuk:</b>				
1	Penambahan luas lahan baru petani	1	4	2
<b>Distributor:</b>				
1	Penambahan luas lahan baru petani	2	-	-
<b>Petani:</b>				
1	Penambahan lahan baru	32	-	3
2	Pengetahuan petani tentang perluasan lahan petani lain	4	18	13

Keterangan:

0 : tidak tahu/tidak ada

1 : kurang tahu

2 : tahu/iya (ada)

menyatakan bahwa petani tidak pernah memperluas areal usahatani. Namun salah satu Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan bahwa ada petani yang memperluas areal lahan usahatani. Petani yang memperluas areal usahatani akan membutuhkan lebih banyak dari yang biasanya. Petani harus mencari pupuk tambahan bagi lahan barunya. Pernyataan dari Petugas Penyuluh Lapang (PPL) tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan luas areal lahan usahatani berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Sebagian besar Kios resmi pupuk bersubsidi yaitu 4 Kios resmi pupuk bersubsidi menyatakan kurang mengetahui adanya perluasan lahan baru oleh petani. Namun 2 Kios resmi pupuk bersubsidi mengungkapkan bahwa mereka pernah mengetahui ada petani yang menambah luas areal lahan mereka. Menurut Kios, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) pupuk bersubsidi. Jika petani tidak mendaftarkan, maka petani harus membeli pupuk bersubsidi di luar daerah mereka atau membeli pupuk non-subsidi. Pernyataan dari Kios resmi pupuk bersubsidi tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan luas areal lahan usahatani tidak

berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Menurut seluruh Distributor bahwa Distributor menganggap bahwa petani tidak pernah memperluas areal usahatani. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh pupuk bersubsidi bagi lahan barunya, petani harus mengurus segala sesuatunya agar lahan usahatani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga tidak akan menimbulkan kelangkaan pada pupuk bersubsidi. Pernyataan dari Distributor resmi pupuk bersubsidi tersebut dapat disimpulkan bahwa penambahan luas areal lahan usahatani tidak berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Menurut 32 petani responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah memperluas areal lahan usahatani mereka, dan 4 petani responden tidak pernah mengetahui bahwa petani lain memperluas lahannya, serta 18 petani responden juga kurang mengetahui petani lain memperluas lahan usahatani. Namun terdapat 3 petani responden yang menyatakan bahwa mereka telah memperluas areal lahan usahatani mereka. Hal ini dikarenakan bahwa mereka ingin memanfaatkan lahan pekarangan/tegalan milik mereka yang kurang terpakai agar menghasilkan keuntungan. Untuk mendapatkan pupuk bagi lahan tersebut,

petani membeli pupuk di luar daerah mereka dan itu merupakan pupuk bersubsidi yang menggunakan jasa tukang ojek. Pupuk ojek ini merupakan pupuk yang menggunakan jasa tukang ojek yang berada di daerah lain, dan dapat dikatakan bahwa ini termasuk dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah tersebut akan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Selain itu, petani mendapatkan pupuk dengan cara meminjam pupuk pada petani lain yang dikenalnya yang pupuk bersubsidinya masih belum digunakan. Petani yang meminjam akan mengembalikan pupuknya apabila petani peminjam ini akan menggunakannya. Selain itu, petani juga mendapatkan pupuk dengan cara membeli pupuk bersubsidi pada petani lain yang memiliki lahan usahatani yang tidak diusahakan. Sebanyak 13 petani responden mengetahui adanya petani yang memperluas areal lahan usahatani mereka, dikarenakan mereka telah mengenal petani yang memperluas lahan, sehingga mereka mengetahuinya. Pernyataan dari petani dapat disimpulkan bahwa penambahan luas areal lahan usahatani berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan pernyataan Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3), dan kesimpulan Tabel 6. Kriteria Faktor Petani yang Tidak Bertanggung-jawab oleh KP3, PPL, Kios Pupuk, Distributor dan Petani

yang diperoleh dari Petugas Penyuluh Lapang (PPL), Kios resmi pupuk bersubsidi, Distributor resmi pupuk bersubsidi, dan petani, peneliti menyimpulkan bahwa faktor pemupukan yang tidak berimbang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

• **Petani yang tidak bertanggung-jawab**  
Dari hasil wawancara dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut:

Pada Tabel 6, seluruh responden Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) menyatakan bahwa Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) kurang mengetahui apakah petani menjual pupuk bersubsidinya kembali. Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar kabar tersebut, karena Komisi Pengawas Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) melakukan pengawasan pada Distributor dan Kios resmi pupuk bersubsidi.

Menurut seluruh Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yaitu bahwa Petugas Penyuluh Lapang (PPL) tidak mengetahui apakah petani telah menjual kembali pupuk bersubsidi yang di dapat atau tidak. Petugas Penyuluh Lapang (PPL) menyatakan

No	Kriteria Faktor Petani yang Tidak Bertanggung-jawab	Jawaban (Jumlah Responden)		
		0	1	2
<b>KP3:</b>				
1	Petani menjual kembali pupuk bersubsidi	-	4	-
<b>PPL:</b>				
1	Petani menjual kembali pupuk bersubsidi	5	-	-
<b>Kios Pupuk:</b>				
1	Petani menjual kembali pupuk bersubsidi	1	6	-
<b>Distributor:</b>				
1	Petani menjual kembali pupuk bersubsidi	-	1	1
<b>Petani:</b>				
1	Pengalaman petani menjual kembali pupuk bersubsidi	33	-	2
2	Penjualan dengan harga yang lebih mahal	-	-	2
3	Pengetahuan petani lain menjual pupuk bersubsidinya	5	22	8

Keterangan:

0 : tidak/tidak tahu

1 : kadang-kadang/kurang tahu

2 : iya/tahu

bahwa mereka hanya mengarahkan petani pada teknologi usahatani. Jadi Petugas Penyuluh Lapang (PPL) tidak mengetahui apakah petani menjual kembali pupuk bersubsidinya atau tidak.

Menurut 6 responden Kios resmi pupuk bersubsidi bahwa mereka kurang mengetahui apakah petani telah menjual kembali pupuk bersubsidi yang di dapatnya. Kios resmi pupuk bersubsidi menyatakan bahwa mereka tidak ingin ikut campur dengan urusan petani. Apabila petani telah menjual kembali pupuk bersubsidinya, petani akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Salah satu Distributor kurang mengetahui apakah petani menjual kembali pupuk bersubsidinya atau tidak. Namun salah satu Distributor lainnya menyatakan pernah mengetahui petani menjual kembali pupuk bersubsidi yang didapatnya, tetapi Distributor tidak mampu berbuat apa-apa karena hal itu telah menjadi urusan pihak kepolisian. Menurut Distributor sebenarnya petani tidak boleh menjual kembali pupuk bersubsidi yang diperuntukkan baginya, karena pupuk bersubsidi tersebut berada dalam pengawasan pemerintah dan tidak diperjual-belikan dan untuk digunakan sebaik-baiknya oleh petani sendiri.

Petani responden sebanyak 33 orang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjual kembali pupuk bersubsidi yang di

dapat dan sebagian besar petani responden tidak mengetahui adanya petani lain yang menjual kembali pupuk bersubsidinya kepada pihak yang menjadi pembeli. Namun menurut pengakuan 2 petani responden, mereka pernah menjual pupuk yang di dapatnya. Penjualan pupuk tersebut dijual kepada sesama petani. Diakui bahwa mereka ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Di daerah ini juga terdapat sistem pinjam pupuk bersubsidi, dikarenakan pupuk bersubsidi masih belum terpakai oleh petani, sehingga dipinjamkan pada petani yang telah dikenalnya. Pernyataan dari petani dapat disimpulkan bahwa faktor petani yang tidak bertanggung-jawab berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

#### **Tingkat Motivasi Petani Dalam Penggunaan Pupuk Bersubsidi Dengan Adanya Kelangkaan Pupuk Bersubsidi**

Analisis tingkat motivasi petani dalam penggunaan pupuk dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi menggunakan total skor yang diperoleh dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Motivasi dikatakan tinggi apabila total skor tiap petani mencapai nilai antara 265-390, sedangkan motivasi dikatakan rendah apabila total skor tiap petani mencapai nilai antara 130-260. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7. Tingkat Motivasi Petani Dalam Berusahatani Dengan Adanya Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wonosari

No	Tingkat Motivasi	Skor	Jumlah Petani	(%)
1	Rendah	130-260	12	34,29
2	Tinggi	265-390	23	65,71
	<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>100</b>

Sumber: Lampiran II



Pada Tabel 7, petani responden yang memiliki motivasi rendah dalam penggunaan pupuk dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi adalah sebesar 12 petani dari 35 petani responden atau sebesar 34,29%. Sedangkan petani yang memiliki motivasi tinggi adalah sebesar 23 petani dari jumlah petani sebesar 35 petani responden atau 65,71%. Perbedaan tingkat motivasi petani dalam penggunaan pupuk antara tingkat motivasi tinggi dan tingkat motivasi rendah terdapat perbedaan yang sangat nyata. Bahwa tingkat motivasi petani yang tergolong tinggi memiliki prosentase yang cukup besar dibandingkan dengan tingkat motivasi petani yang rendah.

Berdasarkan Tabel 7, sebagian besar petani masih memiliki motivasi yang tinggi. Perhitungan tingkat motivasi tinggi dan rendah dengan formulasi milik Umar didapatkan hasil sebesar 73,77%, dimana toleransi kriteria pengambilan keputusan yaitu jika tingkat motivasi  $\geq 50\%$  atau ( $E \geq 50\%$ ) maka motivasi tinggi. Berarti tingkat motivasi petani dalam penggunaan pupuk di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi adalah tinggi. Dapat disimpulkan bahwa petani memiliki tingkat motivasi tinggi dalam penggunaan pupuk meskipun terdapat kelangkaan pupuk bersubsidi di daerahnya. Tingginya motivasi petani dikarenakan petani tidak ingin terpuruk oleh keadaan dan petani ingin tetap berusaha dalam memenuhi kebutuhan usahatannya. Selain itu, tingginya motivasi petani juga disebabkan oleh faktor pemenuhan kebutuhan keluarga karena petani tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai petani yang diakibatkan oleh pendidikan petani responden yang cukup rendah. Faktor kepemilikan lahan juga menjadi faktor bagi petani untuk terus melakukan kegiatan usahatani.

#### **Produktivitas Usahatani Petani Dengan Adanya Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Khususnya Pada Tanaman Padi**

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat produktivitas usahatani petani pada tanaman padi dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi didapatkan nilai Z hitung sebesar  $-5,161$  dengan signifikansi hitung sebesar  $0,00$ . Hal ini berarti bahwa nilai signifikansi

hitung  $<$  toleransi signifikansi ( $0,00 < 0,05$ ) maka terdapat perbedaan produktivitas usahatani pada tahun 2007 dan tahun 2008 akibat adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Dengan begitu terdapat perbedaan yang nyata pada tingkat produktivitas usahatani padi petani antara sebelum kelangkaan pupuk dan sesudah kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang berperan dalam kelangkaan pupuk bersubsidi adalah ketergantungan petani pada pupuk anorganik, pemupukan yang tidak berimbang, penambahan luas areal lahan, dan petani yang tidak bertanggung-jawab.
2. Tingkat motivasi petani dalam penggunaan pupuk akibat adanya kelangkaan pupuk bersubsidi adalah tinggi.
3. Terdapat perbedaan yang nyata pada tingkat produktivitas usahatani khususnya pada tanaman padi akibat adanya kelangkaan pupuk bersubsidi.

### **Saran**

1. Pemerintah sebaiknya tetap memberikan subsidi pupuk kepada petani agar petani tetap memiliki motivasi untuk berusahatani dan produksi petani akan meningkat sehingga mampu mencapai swasembada pangan.
2. Pemerintah (PPL) sebaiknya lebih mendekati diri pada petani agar petani memiliki keinginan untuk menggunakan pemupukan yang berimbang, sehingga mampu menghindari kelangkaan pupuk bersubsidi.
3. Pemerintah sebaiknya lebih memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk menghindari penyalahgunaan pupuk bersubsidi oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab.

4. Pemerintah sebaiknya menindak tegas oknum-oknum yang mampu merugikan, termasuk petani.
5. Pemerintah sebaiknya memberikan pinjaman modal kepada petani untuk berusahatani, agar petani tidak tergantung pada pihak swasta.

Wrihatnolo, R. 2008. *Pembangunan dan Subsidi BBM*.  
<http://wrihatnolo.blogspot.com/>.  
 Diakses tanggal: 03 Mei 2009

#### DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

\_\_\_\_\_. 2002. *Kemelut Kelangkaan Pupuk dan Ketahanan Pangan*. Kompas, 20 Mei 2002.

Danim, S. 2004. *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Handoko, R dan Patriali, P. 2005. Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM. *Jurnal*, hal 43.

Hasibuan, M. 2003. *Organisasi Dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Laporan Market Intelligence. 2008. *Industri Pupuk Menunggu Jaminan Pasokan Gas*. <http://www.datacon.co.id/>. Diakses tanggal: 29 April 2009.

Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi Sumberdaya Manusia (Dalam Perspektif Pembangunan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Sinar Harapan. 2003. *Mencari Pola Subsidi yang Tepat bagi Petani*. <http://www.sinarharapan.co.id/>. Diakses tanggal: 02 Mei 2009.

Sunu, P. dan Wartoyo. 2009. *Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Era Reformasi*. Diakses tanggal: 30 April 2009.